Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 03, September 2026

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN RANAH IDENTIFIKASI MASALAH FORMULASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EVALUASI DAMPAK

Abdul Qohhar Muhyi
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Umam
abdulqohharmuhyi@gmail.com

ABSTRAK

Analisis Kebijakan Pendidikan merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional karena menentukan arah, tujuan, serta strategi dalam pelaksanaan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan adalah suatu proses sistematis untuk mengkaji, menilai, dan memahami kebijakan pendidikan berdasarkan berbagai sudut pandang, seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep dasar analisis kebijakan pendidikan, mencakup pengertian, prinsip-prinsip dasar, serta pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam menganalisis kebijakan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa analisis kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada isi kebijakan semata, tetapi juga pada konteks pembentukan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat, proses implementasi, serta evaluasi dampaknya di lapangan. Terdapat berbagai pendekatan dalam analisis kebijakan, seperti pendekatan rasional, politis, teknokratik, serta pendekatan kritis yang memberikan pemahaman lebih luas terhadap realitas kebijakan pendidikan. Pemahaman terhadap konsep dasar ini penting bagi mahasiswa, akademisi, dan pengambil keputusan agar dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan yang relevan dan berpihak pada peningkatan mutu pendidikan.

Kata kunci : Analisis Kebijakan Pendidikan Ranah Identifikasi Masalah Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Evaluasi Dampak

ABSTRACT

Education policy is a crucial part of the national education system because it determines the direction, goals, and strategies for educational implementation. Education policy analysis is a systematic process for reviewing, assessing, and understanding education policy from various perspectives, such as social, political, economic, and cultural perspectives. This study aims to outline the basic concepts of education policy analysis, including the definition, basic principles, and approaches frequently used in analyzing education policy. The method used in this paper is library research with a descriptive qualitative approach. The results of the study indicate that education policy analysis focuses not only on policy content but also on the context of policy formation, the actors involved, the implementation process, and the evaluation of its impact on the ground. Various approaches to policy analysis, such as rational, political, technocratic, and critical approaches, provide a broader understanding of the realities of education policy. Understanding these basic concepts is essential for students, academics, and decision-makers to formulate and implement relevant policies that support improving the quality of education.
Keywords: Educational Policy Analysis Problem Identification Policy Formulation Policy Implementation Impact Evaluation

A. PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang pokok untuk menentukan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dalam suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap lembaga pendidikan tidak akan pernah lepas dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan dalam negara tempat lembaga pendidikan itu ada. Di Indonesia, yang merupakan negara hukum juga menitikberatkan sektor pendidikan sebagai wahana untuk memajukan negaranya. Bagaimana tidak? Kebijakan demi kebijakan dibongkar pasang untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal, meski realitanya masih jauh dari harapan. Dimulai dari kebijakan pengalokasian 20% APBN untuk anggaran pendidikan yang sampai saat ini masih belum 100% terlaksana, hingga kurikulum yang berubah-ubah. Inkonsistensi pemerintah dalam memutuskan kebijakan pendidikan sering menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di masyarakat dan dunia pendidikan.

Tuntutan paling mendesak dalam memacu pembangunan pendidikan yang bermutu dan relevan ialah peningkatan kemampuan dalam melakukan analisis kebijakan. Para analisis kebijakan dalam bidang pendidikan tidak hanya dituntut untuk menguasai isu-isu pendidikan yang relevan baik isu pendidikan secara internal maupun isu-isu pendidikan dalam kaitannya secara lintas sektoral. Berdasarkan hal tersebut, dalam makalah ini penulis mengkaji tentang “Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan”. Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PEMBAHASAN

Analisis kebijakan pendidikan adalah proses sistematis untuk mengkaji,mengevaluasi, dan menilai kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana suatu kebijakan dibuat, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, dan apa dampaknya terhadap peserta didik, pendidik, lembaga pendidikan, serta masyarakat secara umum. (Hanisy, 2013).

Analisis kebijakan pendidikan tentunya tidak sernata-mata menganalis data dan informasi pendidikan, juga memperhatikan seluruh spek menyangkut proses permbuatan kebijakan, mulai dari analisis rmasalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif, sarnpai pada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan tentang pendidikan. Rumusan alternatif kebijakan pendidikan dihasilkan dari pelaksanaan analisis kebijakan Pendidikan tidak dengan sendirinya atau secara langsung dijadikan kebijakan. Rurnusan kebijakan, jika sudah didukung kekuatan otoritas atau kewenangan yang ada,
maka alternatif kebijakan bisa berubah menjadi kebijakan. Implementasi analisis kebijakan pendidikan adalah proses menerapkan hasil kajian kebijakan ke dalam tindakan nyata untuk memperbaiki system pendidikan. Tahap ini melibatkan kerja sama antar berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat. Mongdong, R. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Implementasi analisis kebijakan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar benar menyelesaikan masalah yang ada. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan data, SDM. kondisi social, budaya, dan komitmen politik. Analisis kebijakan pendidikan tentunya tidak sernata, mata menganalis data dan informasi pendidikan, juga memperhatikan seluruh aspek menyangkut proses permbuatan kebijakan, mulai dari analisis rmasalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif, sarnpai pada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan tentang pendidikan. Rumusan alternatif kebijakan Pendidikan dihasilkan dari pelaksanaan analisis kebijakan pendidikan tidak dengan sendirinya atau secara langsung dijadikan kebijakan. Rurnusan kebijakan, jika sudah didukung kekuatan otoritas atau kewenangan yang ada, maka alternatif kebijakan bisa berubah menjadi kebijakanı. Jadi prosedur menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses yang rasional. Sedangkan proses terjadinya kebijakan menjadi bagiian dari merupakan proses politik (bargaining position) para pihak

yang merniliki kewenangan. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ball,S.J.(2012).Global education inc: New policy networks and the neo-liberal imaginary. NewYork: Routledge. Duke, D. L., & Canady, R. L. (2020). Educational Governance and Policy: A Political Analysis. Boston: Allyn & Bacon. (Edisi terbaru tahun 2020) Hanisy, A. (2013). Konsep Dasar Analisis Kebijakan. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 4(1), 48 -63 Jones, C. O. (2018). An Introduction to the Study of Public Policy (Edisi Terbaru). New York: Wadsworth Publishing. (dikutip dalam Rohman, 2018) Jenkins, W. I. (2019). Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective. London: Martin Robertson. (Edisi Revisi atau cetakan ulang tahun 2020) Sudiyono. (2019). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Definisi Analisis Kebijakan Pendidikan Sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa kata kunci (keywords) yang membangun konstruksi logika berpikir tentang definisi analisis kebijakan pendidikan. adalah prosedur yang menghasilkan informasi kependidikan. menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perurnusan beberapa alternatif kebijakan dalarn pengarnbilan keputusan yang bersifat politis dalarn rangka memecahkan masalah kependidikan (Hanisy, 2013). Analisis kebijakanpendidikan tentunya tidak sernata - mata menganalis data dan informasi pendidikan, juga memperhatikan seluruh aspek menyangkut proses permbuatan kebijakan, mulai dari analisis rmasalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif, sarnpai pada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan tentang pendidikan. Rumusan alternatif kebijakan pendidikan dihasilkan dari pelaksanaan analisis kebijakan pendidikan tidak dengan sendirinya atau secara langsung dijadikan kebijakan. Rurnusan kebijakan, jika sudah didukung kekuatan otoritas atau kewenangan yang ada, maka alternatif kebijakan bisa berubah menjadi kebijakanı.

Jadi prosedur menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses yang rasional. Sedangkan proses terjadinya kebijakan menjadi bagiian dari merupakan proses politik (bargaining position) para pihak yang merniliki kewenangan. Hal senada dijelaskan Suyahnan (2016) menjelaskan analisis kebijakan pendidikan merupakan prosedur yang menghasilkan informasi kondisi pendidikan, menggunakan data sebagai masukan bagi perurnusan alternatif kebijakan pengarnbilan keputusan bersifat politis dalarn upaya mernecahkan masalah pendidikan.Fungsi Analisis Kebijakan Pendidikan Pedoman untuk bertindak bagi pengarnbil keputusan dari analisis kebijakan Pendidikanyang dilaksanakan berfungsi: 1) mencapai ketertiban layanan pendidikan, 2) menjarnin hak asasi setiap warga mendapatkan layanan pendidikan. 3) prograrn kegiatan layanan pendidikan berjalan efektif, 4) aktor pendidikan dapat melaksanakan pendidikan. 5) tertib administrasi bisa diwujudkan. Sedangkan fungsi lainnya dari analisis kebijakan pendidikan, antara lain; 1) fungsi alokasi untuk pengembangan dan kajian tingkatan makro, 2) fungsi Mongdong, R. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 11(7.D), 352-355-354-inkuiri, setiap bahasan isu dan masalah pendidikan integral dengan isu strategis lainnya, misalnya analisis metodologis dan substansi, evaluasi dan meta analisis kebijakan dan argumentasi kebijakan. 3) fungsi kornunikasi bagi pihak terkait misalnya pernbuat keputusan, perencana dan pengelola. perieliti, pelaksana dan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. Karakteristik Analisis Kebijakan PendidikanAnalisis kebijakan pendidikan, dapat diidentifikasi beberapa karakteristik, antara lain: 1) suatu proses atau kegiatan sintesis dari berbagai informasi tentang layanan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan memadukan berbagai informasi yang masuk, diantaranya hasil penelitian yang dilakukan para ahli tentang layanan pendidikan, sehingga diperoleh kesimpulan yang selaras dengan rekomendasi penelitian tersebut. Hal ini berarti objek analisis kebijakan pendidikan adalah proses

penyusunan beserta paket kebijakan pendidikan itu sendiri. Kegiatan utarna analisis kebijakan pendidikan terdiri dari pengumpulan informasi selengkapnya, penarikan kesimpulan dengan prinsip logis. Dengan kaidah ini, analisis kebijakan bisa dikategorikan didasari kaidah ilmiah. 2) inforrnasi menjadi surnber utarna kajian analisis kebijakan yakni keluaran hasil penelitian. Hasilhasil penelitian analisis kebijakan merupakan output dari proses pengolahan data penelitian yang siap digunakan membantu pengarnbilan keputusan serta desain kebijakan pendidikan. Itulah pertimbangannya, analisis kebijakan menjadi salah satu bentuk diserninasi hasil penelitian. 3) keluaran (output) analisis kebijakan berupa rekornendasi pilihan (opsional) keputusan bisa juga dalam bentuk desain kebijakan. Output kebijakan pendidikan lainnya berupa nasihat, petunjuk teknis standar operasional procedural (SOP) berupa bahan, alur, urutan dan target pengarnbilan keputusan tentang pendidikan. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah: Apa definisi dari kebijakan, Apa saja ruang lingkup dari kebijakan, Bagaimana tahapan pembuatan kebijakan, Bagaimana kerangka konseptual analisis kebijakan?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: Memeroleh informasi dan gambaran mengenai definisi kebijakan, Memeroleh informasi dan gambaran mengenai ruang lingkup kebijakan, Memeroleh informasi dan gambaran mengenai tahapan pembuatan kebijakan, Memeroleh informasi dan gambaran mengenai kerangkaan alisis kebijakan pendidikan.

C. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain: Dapat dijadikan pedoman diskusi mata kuliah perencanaan pendidikan islam, Sumber informasi dan pengetahuan khususnya bagi

penulis dan umumnya bagi pembaca.

Pengertian Kebijakan Menurut Ahli

Pengertian Kebijakan Menurut (Noeng Muhadjir, 1993: 15) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejatheraan masyarakat. Dan dipilih kebijakan setidaknya harus memenuhi empat butir yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan: By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi) dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan (Tilaar, 1993). Pengertian Kebijakan Menurut Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh (Syafaruddin, 2008: 75) kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu Polis yang artinya (*city*). Dapat ditambahkan, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Tilaar, 1993). Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa pengertian kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Pengertian Kebijakan Pendidikan Menurut Ahli

Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (policy of education) namun istilah-istilah tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan (Fauziah 2019)cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukan oleh istilah

tersebut (Arif Rohman, 2009: 107-108). Pengertian Kebijakan Pendidikan menurut (Riant Nugroho, 2008: 37) sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan di pahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan Negara Bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara Bangsa secara keseluruhan (Tilaar, 1993).

Pengertian Kebijakan Pendidikan menurut Arif Rohman (2009: 108) kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan (Tilaar, 1993). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kesimpulan Pengertian Kebijakan Pendidikan berdasarkan pada beberapa pandapat mengenai kebijakan pendidikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang di ambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan.

A. Ruang Lingkup Kebijakan

Karena proses kebijakan adalah elemen penting dalam perencanaan pendidikan, maka penting untuk memperjelas konsep 'kebijakan' dan 'pembuatan kebijakan' sebelum melanjutkan lebih jauh. Kebijakan didefinisikan secara fungsional berarti

sebuah keputusan eksplisit atau implisit atau kelompok keputusan yang mungkin menetapkan arahan untuk membimbing keputusan masa depan atau memandu pelaksanaan keputusan sebelumnya. Pembuatan kebijakan adalah langkah pertama dalam siklus perencanaan dan perencana harus menghargai dinamika perumusan kebijakan sebelum mereka dapat merancang prosedur pelaksanaan dan evaluasi secara efektif. Kebijakan, namun, berbeda dalam hal cakupannya, kompleksitas, lingkungan keputusan, berbagai pilihan, dan kriteria keputusan (Haddad, 1995). Adapun ruang lingkup kegiatan analisis kebijakan pendidikan meliputi: Pengumpulan data statistik pendidikan, Pengembangan kurikulum, Sistem pengujian, Penelitian pendidikan dan kebudayaan, Teknologi komunikasi pendidikan, Pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan.

Kegiatan yang terakhir yakni kegiatan pada nomor 6 berfungsi untuk menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan pendidikan, baik kebijakan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek, maupun bahan-bahan untuk kebijakan departemen yang setiap saat diperlukan oleh pengambil keputusan. Salah satu fungsi paling menonjol dari Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Analisis dan Perumusan Bahan Kebijakan dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan dan merumuskan bahan-bahan kebijakan sesuai dengan isu-isu penting pendidikan yang berkembang dalam dunia penelitian, pengembangan, dan masyarakat luas. Dalam suatu proyek yang dinamakan Proyek Perencanaan dan Kebijakan Pendidikan (*Education Policy and Planning Project*) atau proyek EPP yang mendapat bantuan USAID (*The United States Agency for International Development*). Proyek tersebut resmi dilaksanakan pada bulan Juli 1984 dengan tujuan pokok: “meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui perumusan kebijakan dan perencanaan yang lebih baik yang didasarkan pada informasi yang lebih lengkap dan teliti serta metode analisis yang lebih baik terhadap informasi tersebut.” Sejak dilaksanakannya proyek tersebut, berbagai upaya telah dilakukan khususnya dalam melakukan identifikasi terhadap berbagai

masalah pendidikan sebagai sasaran dalam melakukan analisis kebijakan. Sejak saat itu analisis kebijakan dilaksanakan melalui koordinasi di antara berbaga unit di lingkungan Depdikbud. Hasilnya adalah usulan-usulan kebijakan yang sangat berguna dalam mempersiapkan Rumusan kebijakan Tahunan Mendikbud dan Naskah Repelita (Tilaar, 1993). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Pembuatan Kebijakan

Istilah 'pembuatan kebijakan' seperti 'kebijakan' menyiratkan konsepsi bersaing dan asumsi. Sebuah studi dari teoritis dan empiris ilmuwan sosial mengungkapkan dua dimensi penting dari pembuatan kebijakan: orang yang melakukan itu (pelaku) dan bagaimana (proses). Secara historis, aktor dalam pengambilan kebijakan telah dianggap kesatuan dan rasional; lebih

baru-baru analis kebijakan telah memperkenalkan model organisasi publik dan model kepentingan personalistik. Proses elemen telah berfluktuasi antara pendekatan sinoptik (komprehensif) dan pendekatan bertahap.

C. Pendapat salah satu para ahli

Lindblom dan D.K. Cohen (1979) metakkan perbedaan antara metode sinoptik dan metode tambahan dari pembuatan kebijakan. Kerangka analisis kebijakan pendidikan menurut dia, metode sinoptik memerlukan dalam bentuk ekstrim, satu perencanaan pusat tunggal otoritas untuk seluruh masyarakat, menggabungkan kontrol ekonomi, politik, dan sosial menjadi satu perencanaan terpadu. Ini mengasumsikan: (a) masalah yang dihadapi tidak melampaui kapasitas kognitif manusia dan (b) ada eksis kriteria (bukan konflik sosial pada nilai-nilai) oleh yang solusi dapat dinilai dan (c) bahwa pemecah masalah-memiliki insentif yang memadai ntuk tinggal dengan analisis sinoptik sampai selesai (Bukan 'kemunduran' untuk menggunakan perencanaan incremental) (Haddad, 1995). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Adapun tahapan dari pembuatan kebijakan yaitu:

1. Agenda Setting

Tahapan pembuatan agenda kebijakan (agenda setting) adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Tahapan ini merupakan langkah kunci yang harus dilalui sebelum suatu isu kebijakan diangkat dalam agenda kebijakan pemerintah (*government* agenda) dan akhirnya menjadi suatu kebijakan. Sebab tanpa terlebih dahulu masuk dalam agenda setting, tidak mungkin suatu masalah yang ada pada masyarakat – seberapa pentingnya masalah tersebut – dapat diangkat menjadi suatu kebijakan oleh pemerintah. Masalah merupakan keadaan atau kondisi yang mampu menciptakan ketidakpuasan pada sebagian besar orang dan mendorong mereka untuk memenuhi ketidakpuasannya atau mencari penyelesaiannya. Masalah bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Persoalan pendidikan misalnya, bisa terkait dengan perangkat undang-undangnya, sumberdaya insani (Depdiknas, Kementrian PAN, Guru, Dosen, Peneliti), maupun organisasi pelaksananya (Depdiknas, Depkeu, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, SD, SMP, SMA, PT). Yang kadangkala menimbulkan persoalan dilematis adalah bahwa perhatian pada satu persoalan tertentu akan cenderung mengabaikan pada persoalan lain (Peters, 1982). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2. Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Setelah tahapan agenda *setting* dilalui atau suatu isu telah masuk agenda pemerintah, maka tahapan berikutnya adalah membuat formulasi kebijakan. Tahapan formulasi kebijakan merupakan mekanisme yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah masuk dalam agenda pemerintah. Tahapan ini lebih bersifat teknis – dibandingkan tahapan agenda *setting* yang lebih bersifat politis – dengan menerapkan berbagai teknis analisis untuk membuat keputusan terbaik. Model-model ekonomi dan teori pengambilan keputusan (*decision making*) merupakan alat analisis yang berguna untuk mengambil keputusan yang terbaik, dengan meminimalkan resiko kegagalan. Selain

menggunakan aspek rasionalitas *cost-benefit analysis* dalam memilih alternatif keputusan, juga harus menggunakan pertimbangan *social-cost-benefit analysis* dalam memahami aspek masyarakat (Peters, 1982). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

3. Legitimasi Kebijakan

Setelah kebijakan berhasil diformulasikan, sebelum diterapkan pada masyarakat, kebijakan tersebut haruslah memperoleh legitimasi (pengesahan) atau kekuatan hukum yang mengatur penerapan (implementasi) kebijakan pada masyarakat. Legitimasi sangat penting karena akan membawa pengaruh terhadap masyarakat banyak, baik yang menguntungkan bagi sebagian masyarakat maupun yang membawa dampak yang merugikan kelompok lain. Selain itu setiap kebijakan juga membawa implikasi terhadap anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah. Pada umumnya wewenang melakukan legitimasi dimiliki oleh pemerintah atau badan legislatif. Namun kalau dikaji lebih mendalam, bahwa proses legitimasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara negara dan rakyat sebagai sumber legitimasi yang paling utama,
sebab ukuran legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah sangat tergantung pada tersedianya dukungan bagi pemerintah dan apa yang ingin diperoleh dari masyarakat (Peters, 1982).

Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

4. Implementasi

Penentu Implementasi merupakan tahapan pelaksanaan atas sebuah kebijakan. Interaksi merupakan konsep penting dalam implementasi, yang mengacu pada suatu hubungan yang terkadang kompleks. Dalam implementasi terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu (a) formulasi tujuan kebijakan harus jelas termasuk kelompok sasaran; siapa yang berperan; dan bagaimana kebijakan tersebut harus dilaksanakan; dan (b) dana pendukung yang proporsional. Tanpa dana kebijakan tidak akan pernah terealisir (Peters, 1982). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Perspektif Keberhasilan Implementasi

Implementasi tidak hanya dilihat dari pendekatan kepatuhan semata, tetapi juga melihat bagaimana meraih hasil-hasil program yang diinginkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga implementasi menjadi lebih kompleks. Untuk melihat keberhasilan implementasi dapat dilihat dari dua perspektif yaitu: (a) melihat implementasi sebagai kepatuhan pemerintah daerah (organisasi pelaksana) terhadap pemerintah pusat atau organisasi di atasnya (*compliance perspective*) dengan menggunakan pendekatan satu organisasi pelaksana (*single agency*); dan (b) melihat apa yang terjadi (*what happened perspective*). Pendekatan ini melihat interaksi berbagai organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah (*multiple agency and non governmental actor*) untuk melihat faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi suatu kejadian *(a linier model of anticedent*) (Peters, 1982). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

5. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Monitoring Kebijakan**,** Monitoring ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam usaha menjawab pertanyaan mengapa kebijakan/program itu pada suatu tahap dapat menghasilkan 25 konsekuensi yang demikian. Monitoring sendiri terutama berhubungan dengan mendapatkan premis faktual suatu kebijakan, dengan bergerak mundur dari apa yang diamati sekarang untuk menginterpretasikan apa yang telah terjadi sebelumnya (*ex post facto*). Dunn (1981) mengemukakan bahwa monitoring berfungsi untuk: 1. Ketaatan (*compliance*) Menentukan apakah tindakan administrator, staf dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan 2. Pemeriksaan (*auditing)* Menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi *target group* telah mencapai sasaran 3. Laporan *(accounting)* Menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagi akibat implementasi kebijakan sebuah periode waktu tertentu 4. Penjelasan (*explanation)*

Menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijakan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaan tidak cocok (Peters, 1982). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Evaluasi Implementasi

Tahap akhir proses kebijakan adalah penilaian mengenai apa yang telah terjadi sebagai akibat pilihan dan implementasi kebijakan, dan apabila dipandang Monitoring Pelaksanaan kebijakanInformasi tentang hasil kebijakan Evaluasi proses Situasi problematik perlu, dapat dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang telah dilakukan. Menghasilkan evaluasi yang akurat bukanlah pekerjaan mudah, apalagi untuk merubah kebijakan bila ditemukan kesalahan yang memerlukan perbaikan segera. Pada tahap evaluasi, hasil evaluasi akans sangat berguna bagi pemerintah terutama untuk menentukan apakah kebijakan atau program tersebut dapat dilanjutkan, di *determinate*, atau direvisi atau dimodifikasi. Kegiatan evaluasi bukanlah kegiatan yang mudah dilakukan. Berbagai kendala yang menghambat evaluasi adalah (Peters,1985, 146-157) sebagai berikut. a. Kebijakan publik kadang tidak memiliki tujuan yang jelas, yang diakibatkan dari pertimbangan politis. Ketidakjelasan tujuan meliputi: (1) tujuan yang tidak mungkin dicapai; (2) tujuan yang kontradiktif; (3) tujuan yang terlalu sempit atau terlalu spesifik; dan (4) tujuan antara atau tujuan sementara. b. Pengukuran (*measurement*), menyangkut pada penggunaan konsep tertentu sebagai suatu alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu program. Misalnya persoalan *efisiensi*: perbandingan *cost - benefit* atau *input – output*, sangat sulit untuk mengukur *cost* maupun *benefit* khususnya untuk persoalan sosial. Contoh lain persoalan *efektivitas*: sulit dilihat khususnya yang menyangkut kualitasnya (Peters1982). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Evaluasi Dampak Kebijakan

Evaluasi dampak (*evaluation of impact*) berbeda dengan evaluasi implementasi dalam hal waktu. Evaluasi dampak hanya dapat

dilakukan secara memuaskan apabila program telah dilaksanakan secara lengkap dan berjalan dalam waktu yang relatif lama. Kebijakan hanya akan terlihat dampaknya apabila telah cukup lama diimplementasikan dalam masyarakat. Dampak atau hasil-hasil kebijakan memiliki makna atau arti yang berlainan. Pemberian arti sangat tergantung siapa aktor yang menafsirkan arti dampak tersebut sesuai dengan latar belakang kepentingan mereka. Secara konseptual, dampak kebijakan akan dicari dengan pertanyaan, apa yang telah dicapai dari suatu program? Evaluasi dampak sering bersifat terlalu ilmiah dan cenderung mengabaikan realitas. Sebagai akibatnya akan muncul beberapa tipe evaluasi yang terlalu baik tapi justru mengandung kelemahan antara lain anekdot murni; menampilkan data statistik terlalu rinci; berbagai analisis tanpa kesimpulan; argumentasi ahli; dan dominasi intuisi. Menurut Ripley (1985) ada empat dimensi yang berkaitan dengan dampak yaitu: waktu; hubungan antara dampak yang sebenarnya dengan dampak yang ingin dicapai; akumulasi dampak; dan tipe dampak (kesejahteraan ekonomi; pembuatan keputusan; sistem politik; kualitas kehidupan). Untuk membuat desain evaluasi, maka dapat digunakan evaluasi formatif yang merupakan bagian dari penelitian evaluasi yang dilaksanakan pada awal program dilaksanakan dan biasanya dilakukan bersama-sama dengan evaluasi implementasi. Desain evaluasi formatif berisi tentang tujuan yang erat dengan evaluasi implementasi; mengidentifikasi sumber-sumber pembuat tujuan program; pelaksanaan evaluasi dengan fokus analisis pada salah satu tujuan yang ingin diwujudkan dari program; dan mengorganisasi petugas lapangan (Peters, 1982).

D. Kerangka Konseptual Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan dapat dilakukan pada setiap fase proses kebijakan. Ada enam fase dalam proses kebijakan, yaitu inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, evaluasi dan terminasi. Tahap inisiasi mulai ketika masalah yang potensial dirasakan timbul. Pada saat itu berbagai cara yang mungkin untuk memecahkan, mengurangi beban atau meringankan akibat masalah itu dapat dipikirkan secara tepat dan tentatif. Sudah barang tentu dalam fase ini mungkin

sekali perumusan masalah tidak tepat, namun demikian dalam fase ini yang penting adalah mendapatkan "rasa" apakah memang diperlukan pemikiran lebih lanjut untuk merumuskan permasalahan, karena pemikiran lebih lanjut ini akan memerlukan sumber (tenaga, waktu, pikiran). Fase inisiasi juga menunjuk kepada kegiatan inovatif untuk mengkonseptualisasi dan membuat kerangka tentang masalah secara kasar, mengumpulkan informasi untuk melihat secara kasar kebijakan yag perlu diambil dan kemudian mulai mengancar-ancar pilihan kebijakan yang mungkin paling tepat (Sutjipto, 1987). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

1. Estimasi

Dalam tahap estimasi dipikirkan risiko, biaya dan keuntungan dari alternatif yang dipikirkan. Pada tahap ini ditekankan masalah itu secara ilmiah, empirik dan proyektif untuk melihat konsekuensi apa yang akan timbul sebagai akibat pilihan kebijakan itu. Penekanan juga diberikan terhadap penilaian tentang keluaran yang diharapkan dengan bantuan 9 berbagai pendekatan teknis. Kebenaran yang bersifat normatif seringkali tidak dinilai secara tuntas karena terbatasnya alat atau metode untuk hal tersebut (Sutjipto, 1987). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2. Seleksi

Seleksi menunjuk kepada kenyataan bahwa pada akhirnya seseorang harus membuat keputusan. Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk merumuskan masalah dan menilai alternatif di atas, maka pilihan kebijakan harus dibuat. Keputusan jarang dibuat hanya berdasarkan kalkulasi dan perkiraan teknis, tetapi banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan, misalnya dari pihak-pihak yang terlibat dan mempunyai tujuan yang berbeda mengenai informasi ideologis, moral serta kerangka acuan penentu kebijakan. Seringkali keputusan yang dibuat adalah untuk tidak membuat keputusan (Sutjipto, 1987). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

3. Implementasi

Dalam implementasi, yaitu pelaksanaaan dari “option‟ yang dipilih.
Implementasi merupakan kesempatan pertama yang memvalidasikan alternatif yang dipilih dengan realitas. Sebelum implementasi tahaptahap yang diambil masih dalam bentuk harapan, imajinasi, dan penalaran, sedang dalam implementasi hal tersebut secara nyata dilakukan, sambil memberikan balikan kepada penentu kebijakan (Sutjipto, 1987). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

4. Evaluasi

Evaluasi dalam kenyataanya bersifat lebih restrospektif. Dalam fase inisiasi dan estimasi sifat kegiatan adalah antisipatif dan dalam fase seleksi bersifat kekinian. Implementasi merupakan kesempatan untuk mentransformasikan sesuatu hal yang potensial ke dalam realitas dan evaluasi melihat perbedaan antara keduanya. Evaluasi berusaha menjawab pertanyaan seperti kebijakan mana yang sukses dan mana 10 yang gagal,
bagaimana unjuk kerja dapat diukur serta kriteria apa yang digunakan untuk mengukurnya (Sutjipto, 1987).

5. Terminasi

Terminasi berhubungan dengan penyesuaian kebijakan yang tidak fungsional, tidak perlu, berlebihan atau tidak lagi cocok dengan keadaan. Ini merupakan fase yang belum banyak dibahas secara ilmiah. Proses kebijakan mulai dari inisiasi sampai terminasi merupakan proses yang tidak sederhana. Proses ini melibatkan perilaku individual, perilaku kelompok dan masyarakat dalam suatu konteks iklim psikologis dan lingkungan yang variabelnya sangat banyak. Analisis tentang perilaku kebijakan merupakan usaha untuk memahami perilaku itu, dan sekaligus mengkaji wahana yang memungkinkan prilaku itu dapat lebih menunjang pencapaian keluaran kebijakan dengan lebih baik. Keluaran yang dimakusd demikian luasnya karena menyangkut aspek interaksi proses sosial yang hasilnya mempunyai spektrum yang luas pula (Sutjipto, 1987). Adapum kerangka kerja untuk analisis kebijakan pendidikan menurut Haddad (1995) mencakup pra-kebijakan, kegiatan keputusan, proses pengambilan

keputusan itu sendiri, dan perencanaan pasca-keputusan kegiatan. Kerangka ini bukan deskripsi kegiatan yang sebenarnya, melainkan model konseptual untuk mengekstrak dan menentukan elemen-elemen yang dapat dideteksi dan dianalisis. Oleh karena itu harus cukup luas untuk menangkap dan mengintegrasikan proses yang rumit dari setiap pembuatan kebijakan. Namun pada saat yang sama waktu itu harus memisahkan proses tersebut menjadi komponen untuk menentukan bagaimana mereka bekerja dan berinteraksi. Resultan kerangka kerja analisis kebijakan pendidikan skematik terdiri dari tujuh proses kebijakan-perencanaan, empat pertama dari yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan, kelima berkaitan dengan perencanaan, keenam dan ketujuh berkaitan dengan penyesuaian kebijakan: Analisis situasi yang ada, Generasi pilihan kebijakan, Evaluasi pilihan kebijakan, Membuat keputusan kebijakan dalam Pendidikan, Perencanaan implementasi kebijakan, Penilaian dampak kebijakan, Siklus kebijakan berikutnya. Kerangka kerja ini terlihat rumit karena mau tidak mau, itu adalah multifaset dan mencakup berbagai macam proses. Namun, setiap upaya untuk membatasi analisis kebijakan untuk unsur-unsur tertentu atau untuk mengabaikan salah satu elemen menghasilkan sebuah pendekatan yang tidak lengkap untuk analisis kebijakan dan mengarah ke kontroversi sejarah rasional vs politik, atau birokrasi vs pendekatan organisasi (Haddad, 1995) Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

D. Kesimpulan

Analisis kebijakan pendidikan merupakan cara memecahkan masalah yang ada dalam kebijakan - kebijakan tentang pendidikan menggunakan pemahaman yang dimiliki oleh manusia itu sendiri dalam Analisis Kebijakan Pendidikan Ranah Identifikasi Masalah Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Evaluasi Dampak. Adapun ruang lingkup analisis kebijakan pendidikan meliputi pengumpulan data statistik pendidikan, pengembangan kurikulum, sistem pengujian, penelitian pendidikan dan

kebudayaan, teknologi komunikasi pendidikan, dan pengemabangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Tahapan pembuatan kebijakan meliputi agenda setting, agenda pemerintah, formulasi dan legitimasi, dan deklarasi kebijakan. Ada enam fase dalam proses kebijakan, yaitu inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, evaluasi dan terminasi. Dan beberapa pengertian serta contoh yang terkait: Identifikasi Masalah: Menemukan isu krusial di lapangan. Contohnya meliputi ketimpangan akses digital atau rendahnya kualitas literasi guru. Formulasi Kebijakan: Menyusun rancangan solusi atau draf regulasi. Tahap ini melibatkan berbagai aktor seperti akademisi dan birokrat. Implementasi Kebijakan: Menjalankan regulasi yang telah disahkan di tingkat sekolah atau wilayah. Evaluasi Dampak: Menilai efektivitas kebijakan setelah diterapkan. Tujuannya untuk melihat apakah masalah utama berhasil teratasi. Contah lain adalah Pengadaan PPDB atau SPMB.

Analisis kebijakan pendidikan merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi, merancang, dan merekomendasikan kebijakan yang efektif dalam sektor pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan akses, serta relevansi terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Analisis kebijakan pendidikan bukan hanya sekadar kajian teoritis, tetapi menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada masa depan bangsa. Oleh karena itu, analisis ini harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Saran

Seyogyanya analisis dalam bidang pendidikan harus selalu dilakukan karena pendidikan di Indonesia masih jauh dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD alinea IV. Implementasi analisis kebijakan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar - benar menyelesaikan masalah yang ada. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan data,

SDM, kondisi social - budaya, dan komitmen politik. Analisis kebijakan pendidikan tentunya tidak sernata - mata menganalis data dan informasi pendidikan, juga memperhatikan seluruh aspek menyangkut proses permbuatan kebijakan, mulai dari analisis rmasalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif, sarnpai pada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan tentang pendidikan. Rumusan alternatif kebijakan pendidikan dihasilkan dari pelaksanaan analisis kebijakan pendidikan tidak dengan sendirinya atau secara langsung dijadikan kebijakan. Rurnusan kebijakan, jika sudah didukung kekuatan otoritas atau kewenangan yang ada, maka alternatif kebijakan bisa berubah menjadi kebijakanı. Jadi prosedur menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses yang rasional. Sedangkan proses terjadinya kebijakan menjadi bagiian dari merupakan proses politik (bargaining position) para pihak yang merniliki kewenangan.

DAFTARA PUSTAKA

Fauziah, Mira. 2019. “AL-IDARAH : JURNAL MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI ISLAM.” *Doi* 3(1): 95–108. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/alidarah/article/view/5130/pdf.

Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar. (1993). *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Haddad, wadi D. (1995). *Education Policy Planning Process: an applied framework* Unesco, Paris, International Institute of Edutional Planning.

Muhadjir Darwin. (1993). Implementasi Kebijakan, dalam *Pelatihan Analisis Kebijaksanaan Sosial*, PPK UGM, Yogyakarta.

Peters, B. Guy. (1982), *American Public Policy Process and Performance, F*rankiln Watts, New York.

Sutjipto, (1987). *Analisis Kebijaksanaan Pendidikan (Suatu Pengantar*). Padang: IKIP

AZIZAH, S. N. (2023). Upaya guru pendidikan agama Islam dalam peningkatan iman dan taqwa siswa di SMP Islam Sabilurrosyad Malang.

Mongdong, R. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(7.D), 352-355. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12616

Ball,S.J.(2012).Global education inc: New policy networks and the neo-liberal imaginary. NewYork: Routledge. Duke, D. L., & Canady, R. L. (2020).

Educational Governance and Policy: A Political Analysis. Boston: Allyn & Bacon. (Edisi terbaru tahun 2020) Hanisy, A. (2013).

Konsep Dasar Analisis Kebijakan. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 4(1), 48 -63

Jones, C. O. (2018). An Introduction to the Study of

Public Policy (Edisi Terbaru).

New York: Wadsworth Publishing. (dikutip dalam Rohman, 2018) Jenkins, W. I. (2019). Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective.

London: Martin Robertson. (Edisi Revisi atau cetakan ulang tahun 2020) Sudiyono. (2019). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rohman, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.